



IMPLEMENTASI *RISK BASED INTERNAL AUDITING*
(Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

OLEH :

DIAN RISMAYASARI

160810301043

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER

2021



IMPLEMENTASI *RISK BASED INTERNAL AUDITING*
(Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi

OLEH :
DIAN RISMAYASARI
160810301043

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER

2021

PERSEMBAHAN

Puji syukur yang tak terhingga atas berkat dan rahmat Allah SWT dan tak lupa shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, maka selesailah tugas dan tanggung jawab sebagai mahasiswa Sarjana Ekonomi. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bentuk pengabdian, hormat, dan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keempat orang tua yang sangat saya cintai dan hormati, atas segala doa dan kasih sayang, dukungan, nasihat, kesabaran, keikhlasan, ketulusan, dan segala pengorbanan dalam membimbing dan mendidik saya, hingga saya bisa berada di titik ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, serta guru-guru sejak taman kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah bersedia memberi ilmu pengetahuan dan membimbing dengan sabar dan ikhlas serta selalu memotivasi diri ini untuk selalu menggali ilmu lebih banyak lagi;
3. Para sahabat dan teman dekat, terimakasih atas doa, bantuan, dan semangat yang diberikan kepada saya;
4. Dan almamater yang saya banggakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“Everyone has their own pace, and your pace is special in itself as well, so don't care about others too much, just go the way that you're headed, because it would lead you to the special place”

(Christopher Bang)

“Be positive and you will see the positive thing coming”

(Christopher Bang)

“Everything happens for a reason, learn from it and move on”

(Christopher Bang)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Rismayasari

NIM : 160810301043

Jurusan/Prodi : Akuntansi/ S1 Akuntansi

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *RISK BASED INTERNAL AUDITING* (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang telah saya buat berjudul “Implementasi *Risk Based Internal Auditing* (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan,

Dian Rismayasari
NIM. 160810301043

SKRIPSI

IMPLEMENTASI *RISK BASED INTERNAL AUDITING*
(Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi)

Oleh

Dian Rismayasari
NIM 160810301043

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dewi Ayu Puspita, S.E., M.SA., Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Andriana, S.E., M.Sc., Ak

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI RISK BASED INTERNAL
AUDITING (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten
Banyuwangi)

Nama Mahasiswa : Dian Rismayasari

NIM : 160810301043

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan :

Pembimbing I,



Dewi Ayu Puspita, S.E., M.SA., Ak.
NIP. 198602162015042003

Pembimbing II,



Andriana, S.E., M.Sc., Ak.
NIP. 198209292010122002

Mengetahui,
Ketua Program Studi S1-Akuntansi



Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA.
NIP. 197809272001121002

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

IMPLEMENTASI *RISK BASED INTERNAL AUDITING*

(Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dian Rismayasari

NIM : 1608103010043

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

28 Desember 2020

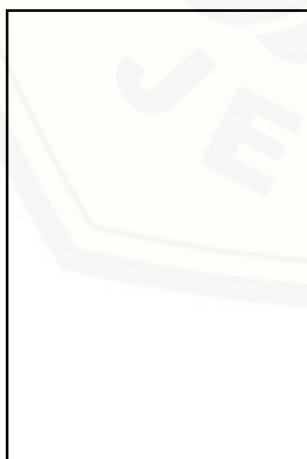
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Sudarno, M.Si., Ak. (.....)
NIP. 196012251989021001

Sekretaris : Kartika, S.E., M.Sc., Ak. (.....)
NIP. 196012251989021001

Anggota : Oktaviani Ari Wardhaningrum, SE., M.Sc. (.....)
NIP. 760016882



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak.
NIP. 197107271995121001

Dian Rismayasari

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Inspektorat Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan *risk based internal auditing*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini implementasi *risk based internal auditing* di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 13 ayat 1 tentang penilaian risiko dan ayat 2 tentang identifikasi risiko dan analisis risiko. Terkait dengan pelaksanaannya Inspektorat Banyuwangi masih belum lama melaksanakan *risk based internal auditing* ini, sehingga masih mengalami banyak kendala dan harus terus dibenahi kedepannya.

Kata Kunci : audit, Banyuwangi, internal, inspektorat, pemerintahan, risiko.

Dian Rismayasari

*Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, University of
Jember*

ABSTRAK

This study aims to provide an overview of how the Inspectorate of Banyuwangi Regency implements risk based internal auditing. This research uses qualitative research using interview techniques. The results show that so far the implementation of risk based internal auditing at the Inspectorate of Banyuwangi Regency has been running in accordance with Reupblik Indonesia Government Regulation Number 60 of 2008 concerning Government Internal Control System Article 13 paragraph 1 concerning risk assessment and paragraph 2 concerning risk identification and risk analysis. Regarding the implementation, the Banyuwangi Inspectorate has recently carried out this risk based internal auditing so that there are still many obstacles and must continue to be addressed in the future.

Keywords : *audit, Banyuwangi, internal, inspectorate, government, risk..*

RINGKASAN

IMPLEMENTASI RISK BASED INTERNAL AUDITING (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi; Dian Rismayasari, 160810301043; 2020; 80 halaman, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.

Pemerintah merupakan sistem yang menjalankan kekuasaan dan wewenang untuk mengatur kehidupan politik, sosial dan ekonomi sebuah negara dan bagian-bagian negara. Pemerintah dapat juga diartikan sebagai kelompok orang-orang yang dengan bersama-sama menanggung tanggung jawab menggunakan kekuasaan yang terbatas. Pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pengaturan wewenang pemerintahan Indonesia dibagi dalam tiga asasa yaitu sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi. Indonesia pada saat ini dalam pembagian kewenangan pemerintahannya menggunakan asas atau sistem desentralisasi. Penggunaan desentralisasi ini dimulai semenjak dikeluarkannya Ketetapan MPR-RI Nomor XVMPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang isinya menjelaskan terkait aturan, pembagian dan memanfaatkan sumber daya Negara yang berkeadilan, serta penyalarsan keuangan pusat dan keuangan daerah dalam kerangka NKRI. Faktanya, pelaksanaan pemerintahan yang didesentralisasikan ini masih belum berjalan maksimal dan belum bisa dikatakan sukses. Dampak negatif dari sistem desentralisasi ini adalah semakin meluasnya *fraud*. *Fraud* yang sangat sering ditemukan terjadi di ruang lingkup pemerintah yakni jenis korupsi.

Sistem Pengendalian Intern (Berikutnya akan disebut SPI) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diartikan sebagai sebuah proses kegiatan dan tindakan yang utuh dilakukan oleh pemimpin dan seluruh bawahannya secara terus-menerus, untuk memberi keyakinan atau kepercayaan yang cukup terkait tercapainya tujuan organisasi dalam keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, kegiatan yang efektif dan efisien, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Berhasil tidaknya sistim pengendalian ini tidak lepas dari

peran auditor, auditor memiliki peran yang penting salah satunya terkait dengan diterapkannya *risk based internal auditing* dalam SPI. *Risk based internal auditing* merupakan sebuah metode atau cara yang dipergunakan oleh auditor internal, pelaksanaannya fokus memprioritaskan risiko dan prosesnya juga fokus pada pengendalian risiko yang bisa saja terjadi. Semakin tinggi resiko suatu wilayah, maka harus semakin tinggi pula perhatian yang harus diberi pada audit (Tunggal, 2012).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Inspektorat Kabupaten Banyuwangi mengimplementasikan risk based internal auditing. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data primer yang berasal dari wawancara langsung kepada tim yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini pengimplementasian risk based internal auditing sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Reupblik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah. Terkait dengan fraud belum dapat dilihat dengan pasti perannya, hal ini dikarenakan Inspektorat Banyuwangi masih belum lama melaksanakan risk based internal auditing ini.

SUMMARY

Implementation Of Risk Based Internal Auditing (Cases Study In Inspectorate of Banyuwangi Regency); Dian Rismayasari, 160810301043; 2020; 78 pages; Accounting Department Faculty of Economic and Business University of Jember

Government is a system that exercises power and authority to regulate the political, social and economic life of a country and parts of the country. Government can also be defined as a group of people who jointly bear the responsibility of using limited powers. Government consists of central government and regional government. Regulation of the authority of the Indonesian government is divided into three principles, namely centralization, decentralization and deconcentration. Currently, in the division of government authority, Indonesia uses the principle or decentralization system. The use of decentralization began with the issuance of MPR-RI Decree Number XVMPR / 1998 concerning the Implementation of Regional Autonomy, which explains the rules, distribution and utilization of equitable State resources, as well as the alignment of central and regional finances within the framework of the Republic of Indonesia. In fact, the implementation of this decentralized government is still not running optimally and cannot be said to be successful. The negative impact of this decentralized system is the spread of fraud. Fraud that is very often found occurs within the scope of the government, namely the type of corruption.

The Internal Control System (hereinafter referred to as SPI) in the Republic of Indonesia Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System is defined as a complete process of activities and actions carried out by the leader and all of his subordinates continuously, to provide sufficient confidence or trust. related to the achievement of organizational objectives in financial reporting reliability, safeguarding state assets, effective and efficient activities, and compliance with laws and regulations. The success or failure of this control system cannot be separated from the role of the auditor, the auditor has an important role, one of which is related to the implementation of risk based

internal auditing in the SPI. Risk based internal auditing is a method or method used by internal auditors, its implementation focuses on prioritizing risks and the process also focuses on controlling risks that may occur. The higher the risk of an area, the higher the attention that must be paid to the audit (Tunggal, 2012).

This study aims to provide an overview of how the Inspectorate of Banyuwangi Regency implements risk based internal auditing. This research uses qualitative research using primary data that comes from direct interviews with the relevant team. The results show that so far the implementation of risk based internal auditing has been running in accordance with the Reupblik Indonesia Government Regulation Number 60 of 2008 concerning the Government Internal Control System. Regarding fraud, its role cannot be seen with certainty, this is because the Banyuwangi Inspectorate has not long been implementing this risk based internal auditing.

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat yang telah diberikan, sehingga skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI RISK BASED INTERNAL AUDITING (Studi Kasus pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi)” berhasil terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Dapat terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, bimbingan, dan kemudahan yang telah diberikan demi kelancaran penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat yang diberikan sehingga segalanya yang tak mungkin menjadi mungkin serta Nabi Muhammad SAW atas segala petunjuk yang diberikan sehingga kami semua dijauhkan dari zaman jahiliyah;
2. Keluarga besar penulis
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Program Studi Strata Satu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Ibu Dewi Ayu Puspita, S.E., M.SA., Ak, selaku dosen pembimbing I dan Andriana, S.E., M.Sc., Ak., selaku dosen pembimbing II yang sangat sabar dan tulus dalam membimbing, memberikan saran dan kritik yang membangun, serta meluangkan waktu untuk penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Dr. Siti Maria Wardayanti, M.Si, Ak., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa;

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah bersedia membagi ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan serta memotivasi diri ini untuk selalu menambah ilmu;
9. Seluruh Staf Karyawan, pihak akademik, ruang baca dan tata usaha di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember atas bantuan pelayanan administrasinya dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Banyuwangi atas bantuan informasinya dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Sahabat yang selalu memberi dukungan dan bantuan, Alya Arzia Usnah, Cahya Fitriana, Leonita Catherine Wijaya, Nurikke Agus Fitriani, Qotrunnada Charisa Salsabila, Shopia Adnani, Triska Maulidya dan Vika Dwi Nur Aprilia;
12. Semua pihak yang membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, termasuk dalam penyusunan skripsi ini yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun penulisan dalam skripsi ini, mohon sekiranya dimaafkan. Demikian, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai positif bagi almamater tercinta, serta bagi setiap pihak yang membutuhkan.

Jember,
Penulis

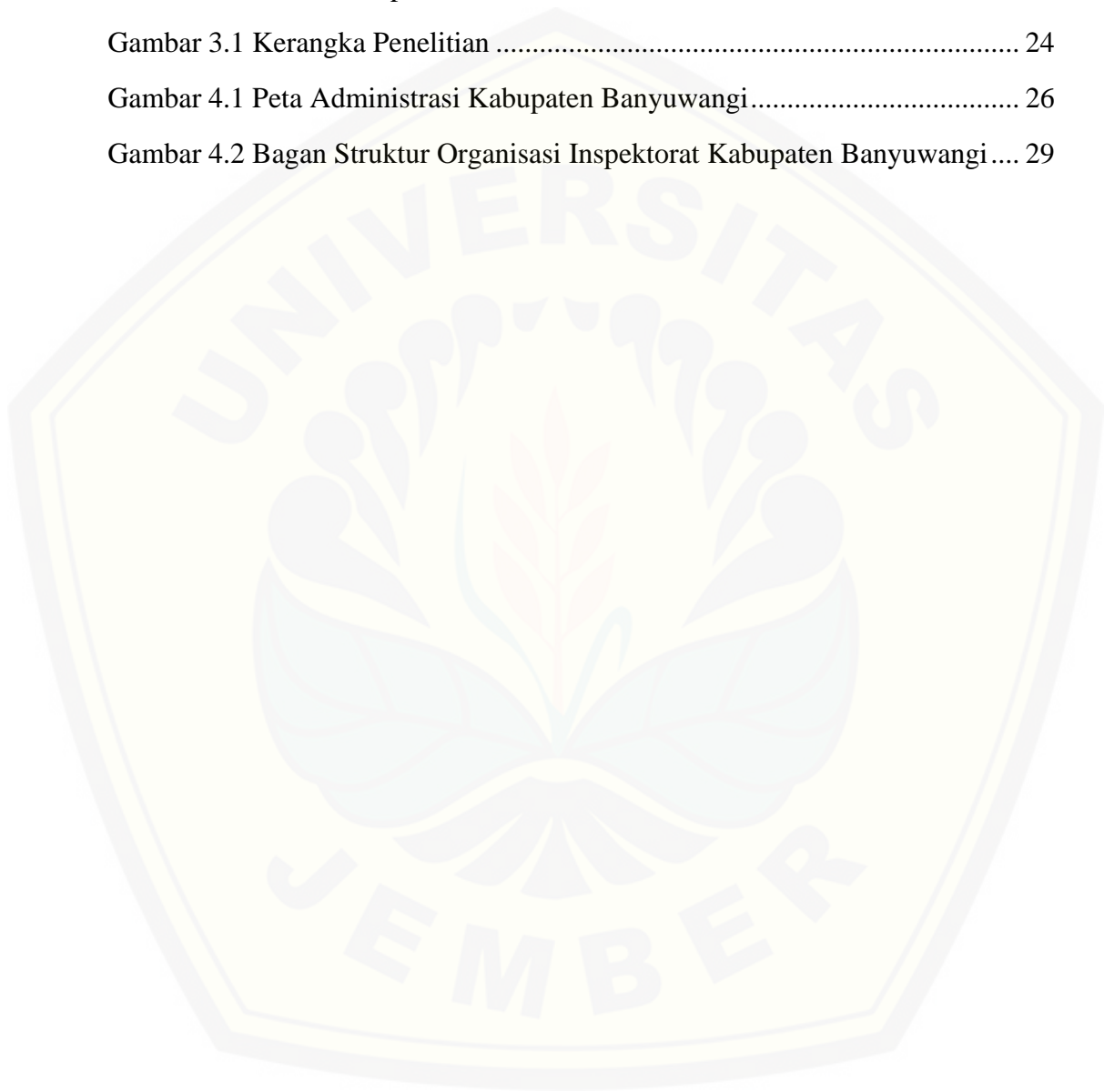
DAFTAR ISI

	Halaman.
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xii
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Sistem Pengendalian Internal (SPI).....	8
2.1.2 <i>Risk Based Internal Auditing</i>	10
2.2 Penelitian Terdahulu	16

BAB 3. METODE PENELITIAN.....	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	20
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	20
3.4 Keabsahan Data	21
3.5 Metode Pengnalisasi Data.....	22
3.6 Tahapan Penelitian.....	24
BAB 4. PEMBAHASAN	25
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	25
4.1.1 Deskripsi Wilayah.....	25
4.1.2 Visi dan Misi Objek Penelitian.....	25
4.1.3 Inspektorat Kabupaten Banyuwangi	27
4.1.4 Sturktur Organisasi	29
4.2 Implementasi <i>Risk Based Internal Auditing</i> di Inspektorat Kabupaten Banyuwang	30
4.3 Kendala	36
BAB 5. PENUTUP.....	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	37
5.3 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	

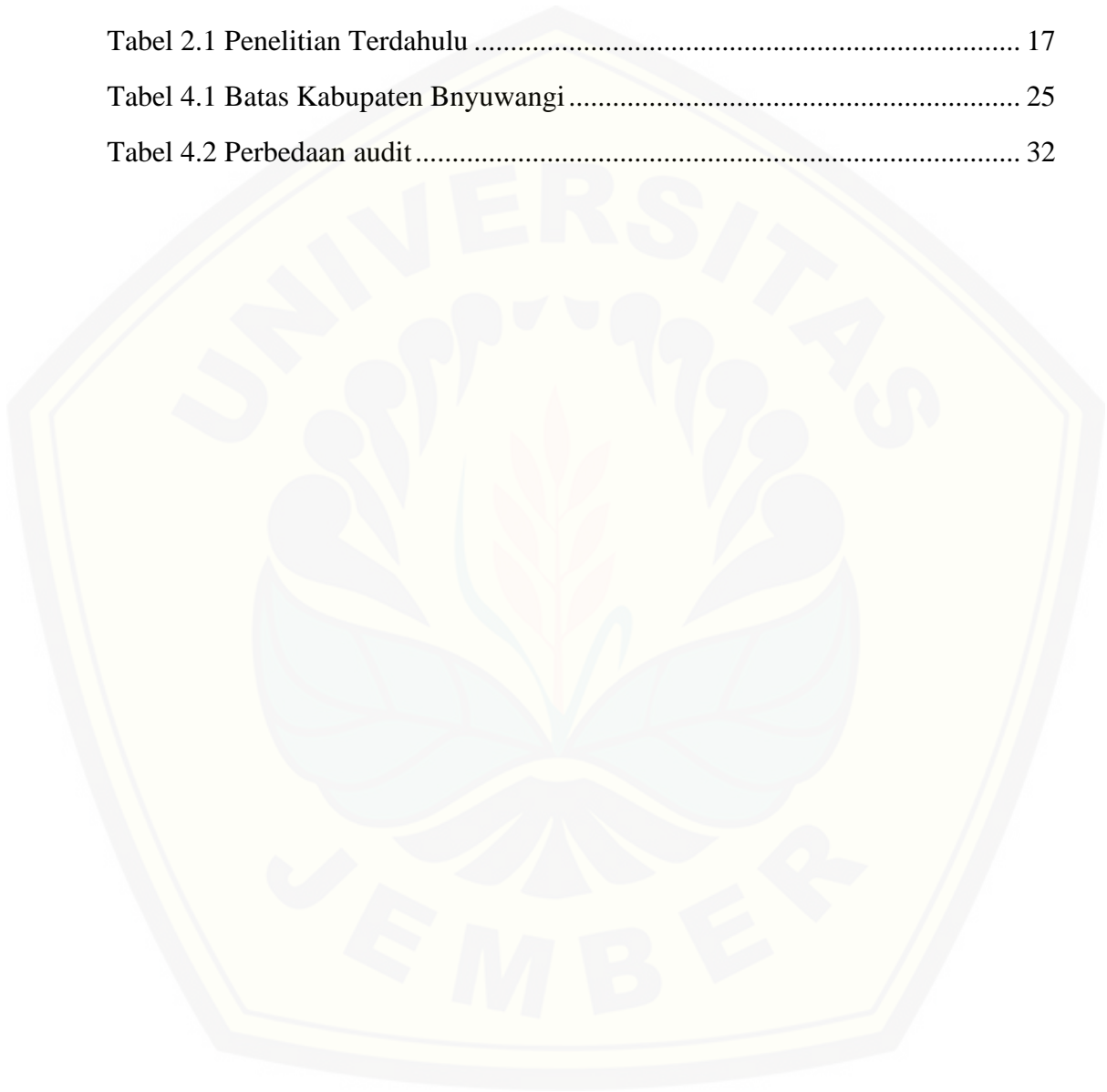
DAFTAR GAMBAR

	Halaman.
Gambar 1.1 Kasus Korupsi di Indonesia.....	4
Gambar 3.1 Kerangka Penelitian	24
Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi.....	26
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.....	29



DAFTAR TABEL

	Halaman.
Tabel 2.1 Perubahan Pendekatan Audit Internal Berbasis Risiko.....	14
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Batas Kabupaten Bnyuwangi.....	25
Tabel 4.2 Perbedaan audit.....	32



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu negara memiliki beberapa hal penting di dalamnya, salah satunya adalah pemerintahan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah merupakan sistem yang menjalankan kekuasaan dan wewenang untuk mengatur kehidupan politik, sosial dan ekonomi sebuah negara dan bagian-bagian negara. Pemerintah dapat juga diartikan sebagai kelompok orang-orang yang dengan bersama-sama menanggung tanggung jawab menggunakan kekuasaan yang terbatas. Pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pada pelaksanaannya, pemerintah pusat dan daerah harus mempunyai kerjasama yang baik terkait dengan kekuasaan, pelimpahan dan pembagian wewenang supaya tercapai kondisi yang baik dan seimbang. Pengaturan wewenang pemerintahan Indonesia dibagi dalam tiga asas yaitu sentralisasi, desentralisasi dan dekonsentrasi.

Sentralisasi atau yang juga dikenal dengan paham sentralisme merupakan bentuk kenegaraan dimana pusat semua pengambilan keputusan sosial ekonomi dan politik ada di satu pusat (Marbun 1996). Desentralisasi merupakan pemberian kekuasaan oleh pusat kepada daerah otonom agar mengurus dan mengatur sendiri segala urusan pemerintah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004 pasal 1 angka 7 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang N0.5 Tahun 1974 dijelaskan bahwa penyerahan kekuasaan pemerintah pusat ke pemerintah daerah memiliki tujuan untuk menjadikan pemerintah lebih efisien dan juga menghasilkan otonomi. Otonomi adalah masyarakat daerah bebas mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Terakhir, Undang-undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa Dekonsentrasi merupakan asas dimana pemerintah pusat melimpahkan wewenangnya atau kekuasaannya pada pemerintah daerah atau wakil pemerintahan yaitu gubernur dan pada badan vertikal di wilayah tertentu.

Dekonsentrasi merupakan perpaduan antara sentralisasi dan desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan kekuasaan atau wewenang pada pemerintah daerah, namun hanya sebatas administrasi saja, sedangkan kewenangan politiknya tetap ada pada pemerintahan pusat. Dasar hukum dekonsentrasi terdapat dalam Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2001.

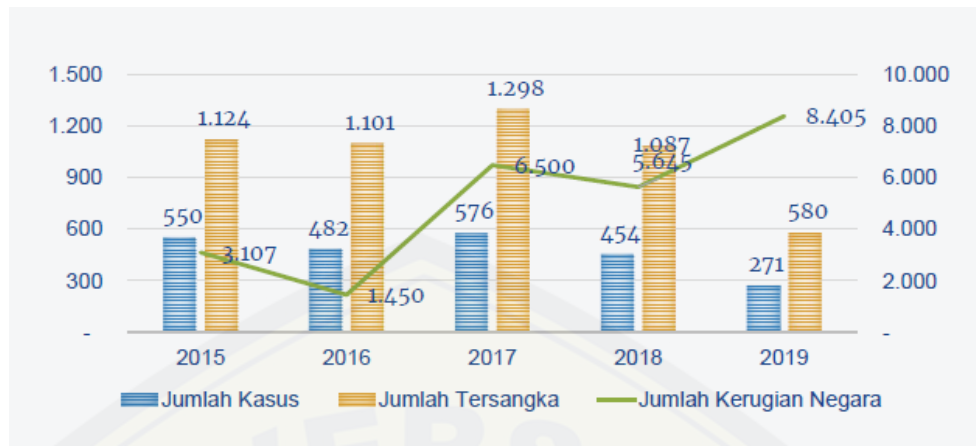
Indonesia pada saat ini dalam pembagian kewenangan pemerintahannya menggunakan asas atau sistem desentralisasi. Penggunaan desentralisasi ini dimulai semenjak dikeluarkannya Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang isinya menjelaskan terkait aturan, pembagian dan memanfaatkan sumber daya Negara yang berkeadilan, serta penyelarasan keuangan pusat dan keuangan daerah dalam kerangka NKRI. Setelah itu dikeluarkan juga Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-undang nomor 25 tahun 1999 yang mengatur hubungan antara keuangan daerah dan keuangan pusat. Semenjak diterapkannya desentralisasi ini, kewenangan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu pemerintahan pusat, provinsi (pemerintahan daerah tingkat 1), dan kabupaten/kota (pemerintahan daerah tingkat 2).

Apabila dilaksanakan dengan maksimal, pelaksanaan sistem desentralisasi ini memiliki banyak dampak yang positif bagi pemerataan pembangunan, terutama bagi daerah-daerah yang tertinggal atau terpelosok. Desentralisasi memungkinkan untuk pemerintah daerah menyusun, mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, pemerintah pusat tidak ikut campur tangan secara langsung, sehingga pembangunan masing-masing wilayah bisa lebih merata karena diatur dan dikelola secara langsung oleh pemerintah daerahnya sendiri. Faktanya, pelaksanaan pemerintahan yang didesentralisasikan ini masih belum berjalan maksimal dan belum bisa dikatakan sukses. Desentralisasi di Indonesia hingga saat ini secara pelaksanaan masih jauh dari yang diharapkan. Sampai sekarang masih dapat terlihat desentralisasi

condong menguntungkan penguasa lokal, dan juga adanya desentralisasi yang semakin menyuburkan korupsi di daerah (Simanjuntak, 2015). Berdasarkan penelitiannya, Simanjuntak menemukan bahwa dampak negatif dari sistem desentralisasi ini adalah semakin meluasnya *fraud*. Bukan hanya di pemerintahan pusat saja hal ini bisa terjadi, tetapi kini *fraud* juga ditemukan tumbuh subur di pemerintah daerah bahkan di pemerintah desa.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menjabarkan pengertian dari *fraud* adalah: “*in the broadest sense, fraud can encompass any crime for gain that uses deception as its principal modus operandus*” (Murdock & Murdock, 2018). Dalam pengertian luas, *fraud* dapat merupakan perbuatan-perbuatan yang mencakup kejahatan apapun yang bertentangan dengan hukum, sengaja dilakukan oleh pihak luar atau dalam (perseorangan ataupun kelompok) untuk mendapatkan untung, baik langsung ataupun tidak secara langsung memberi dampak kerugian kepada orang lain. Lebih spesifik lagi, dalam Black’s Law Dictionary *fraud* diidentifikasi sebagai suatu bentuk pengungkapan yang sengaja dibuat salah atau sengaja menyembunyikan fakta, guna mempengaruhi pihak tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang dapat merugikan.

Ada banyak jenis *fraud* yang disimpulkan oleh ACFE, yang sangat sering ditemukan terjadi di ruang lingkup pemerintah yakni jenis korupsi. Indonesia dari hasil survei yang dilakukan oleh *transparency international*, pada tahun 2018 Indonesia memiliki indeks persepsi korupsi nomor 4 terbesar di ASEAN dan di seluruh dunia berada di tingkat 89, dengan skor sebesar 38. Berdasarkan data yang didapat dari ICW (*Indonesia corruption watch*) menunjukkan seperti berikut.



Gambar 1.1 Kasus Korupsi di Indonesia

Sumber: Trend Peningkatan Korupsi 2019 *Indonesia Corruption Watch* (ICW, 2019)

Sekitar tahun 2016 jumlah korupsi yang terjadi di Indonesia beserta jumlah tersangka dan kerugian negara menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2017 kasus korupsi kembali meningkat, jumlah kerugian yang ditanggung negara juga meningkat jauh hingga 4,5 kali lipat dari sebelumnya. Pada tahun 2018, kasus korupsi kembali menurun. Sedangkan, pada tahun 2019 kasus korupsi juga semakin menurun dengan jumlah tersangka yang lebih sedikit dari tahun sebelumnya, tetapi jumlah kerugian yang diderita negara jauh lebih banyak delapan kali lipat dari sebelumnya. Apabila dibiarkan hal ini tentu akan membahayakan.

Pemerintah tidak diam saja menanggapi hal ini. Telah banyak cara yang dilakukan untuk mengurangi korupsi salah satunya dengan mengeluarkan sistem agar tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang bagus dapat terwujud. Sistem yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau disingkat SPIP. SPIP digunakan sebagai pengendalian pemerintah yang prakteknya dilakukan oleh APIP (Aparat pengawas intern pemerintah) dan BPKP (badan pengawas keuangan dan pembangunan).

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 tentang SPIP, SPIP merupakan sistem pengendalian internal yang penyelenggaraannya di pemerintah daerah ataupun pusat dilakukan secara keseluruhan. Pengawasan dalam SPIP terdiri dari review, pengauditan, pemantauan dan pengawasan lainnya. Apakah pemerintah sudah melakukan pekerjaannya sesuai tugas, rencana dan juga kebijakan yang berlaku, serta bagaimana tingkat efisiensi dan efektifnya, dapat dilihat melalui pengawasan intern (Sudrajat,2013).

Berhasil tidaknya sistem pengendalian ini tidak lepas dari peran auditor, auditor memiliki peran yang penting salah satunya terkait dengan diterapkannya *risk based internal auditing* dalam SPI. *Risk based internal auditing* merupakan sebuah metode atau cara yang dipergunakan oleh auditor internal, pelaksanaannya fokus memprioritaskan risiko dan prosesnya juga fokus pada pengendalian risiko yang bisa saja terjadi. Semakin tinggi resiko suatu wilayah, maka harus semakin tinggi pula perhatian yang harus diberi pada audit (Tunggal, 2012).

Penelitian yang dilakukan ini merupakan hasil dari pengembangan penelitian terdahulu oleh Anwar (2009) yang memiliki judul *Risk Based Internal Auditing* dan Implementasinya Pada PT Indonesia Buffon Film (PT IBF). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada objeknya. Penelitian terdahulu dilakukan di sebuah PT, untuk penelitian kali ini peneliti mengambil objek pemerintahan yang ada di sekitar Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jember dan Situbondo. Berdasarkan data sementara yang diperoleh, inspektorat yang telah menerapkan *risk based internal auditing* di dari keempat kabupaten tersebut adalah Inspektorat Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hal tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti terkait sejauh mana implementasi *risk based internal auditing* telah dilaksanakan, dan bagaimana pelaksanaan tersebut dapat berdampak terhadap pencegahan *fraud* yang mungkin terjadi di instansi terkait. Penelitian kali ini dilaksanakan dengan judul “**IMPLEMENTASI**

RISK BASED INTERNAL AUDITING (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi)”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang dipaparkan dalam latar belakang, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi *risk based internal auditing* di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang diinginkan untuk dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran bagaimana implementasi *risk based internal auditing* yang diterapkan di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang bisa diperoleh antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberi sumbangsih pikiran dan menambah wawasan sekaligus memperluas pemahaman mengenai bagaimana implementasi *risk based internal auditing* yang diterapkan di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini bagi penulis, adalah memenuhi syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dan diharapkan dapat menyampaikan pemahaman dalam bidang kajian yang diteliti. Bagi intsansi, penelitian ini diharap dapat memberi

gambaran dan masukan untuk Inspektorat Kabupaten/Kota se-Karesidenan Besuki mengenai implementasi *risk based internal auditing*. Bagi pihak lainnya, penelitian ini diharap bisa dipergunakan dan dijadikan sebagai sumber referensi atau informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya di masa depan.

3. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini diharap dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang implementasi *risk based internal auditing*, serta peneliti bisa mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh dalam bidang terkait semasa perkuliahan selama ini, agar masalah yang ada dapat dipecahkan dan tercapai keselarasan antara pengetahuan secara teori maupun praktiknya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem Pengendalian Intern (Berikutnya akan disebut SPI) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diartikan sebagai sebuah proses kegiatan dan tindakan yang utuh dilakukan oleh pemimpin dan seluruh bawahannya secara terus-menerus, untuk memberi keyakinan atau kepercayaan yang cukup terkait tercapainya tujuan organisasi dalam keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, kegiatan yang efektif dan efisien, dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. COSO didalam Tunggul (2012) menyatakan bahwa, *“Internal control is a process, affected by an entity’s board of directors, management and other personnel, designed to provided reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting and compliance with applicable laws and regulations”*. Menurut Kumat (2011), pengendalian internal merupakan suatu cara yang digunakan untuk membimbing, mengamati dan mengukur sumber daya yang ada dalam sebuah organisasi. Peran penting dari pengendalian internal adalah untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud* serta melindungi sumber daya didalamnya.

Menurut Dull, dkk (2012) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berikutnya disebut sebagai SPIP) terdiri dari beberapa tujuan, antara lain:

1. Tujuan pengendalian dari proses operasi

Tujuan pengendalian proses operasi terdiri dari *effectiveness of operations* (efektifitas dari operasi), *efficient employment of resources* (efisiensi karyawan terhadap sumber daya), dan *resource security* (keamanan sumber daya)

2. Tujuan pengendalian dari proses informasi

Tujuan pengendalian proses informasi terdiri dari *input validity* (validitas input), *input completeness* (ketuntasan input), *input accuracy* (akurasi input), dan *update completeness and accuracy* (perbaruan ketuntasan dan akurasi).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern memiliki tujuan memberikan keyakinan yang cukup terkait dengan:

1. Pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien
2. Keandalan laporan keuangan
3. Pengamanan aset negara
4. Kepatuhan pada peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah juga mengupas mengenai unsur-unsur dalam SPIP, yang terdiri dari lima unsur antara lain: unsur penilaian risiko, lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, pemantauan pengendalian, informasi dan komunikasi. Penilaian risiko terdiri dari:

- A. Pengidentifikasian risiko
- B. Penganalisan risiko

Untuk melakukan penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah harus membuat:

1. Tujuan instansi pemerintah
2. Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

2.1.2. Risk Based Internal Auditing

Risk based internal auditing adalah sebuah metode atau cara yang dipergunakan oleh auditor internal dalam melakukan pekerjaannya, *Risk based internal auditing* memberi jaminan jika risiko yang terdapat dalam sebuah organisasi telah diproses dengan baik oleh manajemen dan mempunyai batas risiko tidak berdampak pada tujuan perusahaan (Restukumala, 2017). *Risk based internal auditing* dapat memperlebar dan menaikkan tingkat model penilaian risiko dengan cara menyaring visi audit. Menurut McNamee (1997), “*risk assesement in internal auditing identifies measures and prioritizes risks so that focus is placed on the auditable areas of greatest significance*”. Mcnamee menerangkan jika penilaian risiko pada audit internal mengidentifikasi pengukuran dan memprioritaskan risiko-risiko sehingga fokusnya dapat diposisikan pada daerah yang signifikansinya paling besar untuk dilaksanakan audit.

Tunggal (2012) mengungkapkan bahwa *risk based internal auditing* adalah sebuah audit yang pelaksanaannya fokus dan memprioritaskan risiko bisnis dan prosesnya, juga fokus pada pengendalian ririsiko yang bisa saja terjadi. Semakin tinggi resiko suatu wilayah, maka harus semakin tinggi pula perhatian yang harus diberi pada audit. Menurut Anwar dalam penelitiannya menyatakan bahwa,

“risk based internal auditing as a methodology that links internal auditing on organization overall risk management framework. Risk based internal auditing allows internal auditing to provide assurance to the board that risk management processes are managing risks effectively, in reaction in the risk appetite” (Anwar, 2009)

Disimpulkan bahwa menurut anwar *risk based internal auditing* merupakan sebuah metode yang menautkan audit internal dalam sebuah organisasi secara keseluruhan dengan kerangka manajemen risiko. *Risk based internal auditing* memperkenankan audit intern menyediakan jaminan pada jajaran direksi jika proses manajemen risiko telah secara efektif mengelola resiko, sebagai reaksi terhadap selera berisiko.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2012), pedoman *risk based internal auditing* adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Peraturan Menteri Pembangunan Nomor KM 60 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan Tugas Melaksanakan Pengawasan Intern. Selain itu, menurut BPKP juga diberlakukannya *risk based internal auditing* dikarenakan adanya perubahan paradigma yang ada. BPKP menyatakan “Paradigma auditor internal di masa sekarang sudah tidak lagi hanya sekedar *watch dog*, tapi sudah menjadi lebih lagi dimana auditor internal memiliki peran untuk membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk itulah sebuah penilaian terkait proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola harus dijadikan sebagai dasar auditor internal, sebagai sebuah perubahan paradigma yang sangat penting.” (www.BPKP.co.id)

Pelaksanaan *risk based internal auditing* mempunyai beberapa tujuan, Tunggal (2012) menyimpulkan secara umum tujuan dilaksanakannya adalah untuk: mengurangi resiko, antisipasi wilayah yang memiliki resiko potensial, dan melindungi perusahaan. Menurut Effendi dalam penelitian Mohammad, dkk (2015) *risk based internal auditing* memiliki tujuan menguji sistem pengendalian yang digunakan dalam organisasi mampu mengurangi resiko hingga tingkat yang rendah. Tujuan lainnya menurut Dunil dalam penelitian (Dewi Yuniarti Rozali & Mohammad, 2015) adalah sesuai dengan namanya, dalam rangka mengurangi risiko yang ada dan juga untuk menjaga agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa diantisipasi sebelum benar-benar terjadi.

Sebuah organisasi memiliki potensi untuk gagal mencapai tujuannya, hal ini bisa terjadi apabila organisasi tersebut tidak dapat mengelola risiko yang ada di dalamnya dengan baik. Disinilah fungsi *risk based internal auditing* yaitu untuk membantu organisasi mengelola risikonya dengan baik dan bisa tujuan yang dimiliki dapat dicapai (Tampubolon, 2015).

Fungsi dari *risk based internal auditing* menurut *The association of chartered certified accountants (ACCA)* dalam penelitian Tampubolon (2015)

yaitu guna memberi kepastian pada dewan komisaris, jajaran direksi dan komite audit dalam hal:

1. Instansi sudah mempunyai proses manajemen risiko yang dirancang dengan baik
2. Proses manajemen risiko telah diintegrasikan dan berfungsi seperti yang diharapkan
3. Tata kelola dan kerangka kerja kontrol sudah tersedia dengan cukup dan fungsinya berjalan baik
4. Manajemen bisa melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara baik

Disamping tujuan dan fungsinya, *risk based internal auditing* juga memiliki banyak manfaat antara lain: Lebih efisien dibandingkan dengan metode audit internal yang berkaitan dengan risiko, konsepnya lebih sederhana, memiliki mekanisme yang satu-padu, dan pelaksanaannya memberikan nilai tambah bagi auditor internal yaitu melalui pemberian rekomendasi-rekomendasi terkait dengan cara bagaimana agar manajemen dapat secara efektif memitigasi risiko (Kurniawan, 2015). Manfaat lain yang dapat diterima oleh instansi atau organisasi apabila menggunakan *risk based internal auditing* menurut *Institut of internal auditor* (2016) adalah: (1) Manajemen telah melakukan identifikasi, menilai dan memberikan respon terhadap risiko sesuai dengan *risk appetite*, (2) Dalam pengelolaan risiko bawaan terdapat respon yang cukup efektif, (3) Disaat risiko residual tidak sesuai, dapat diambil tindakan untuk memperbaiki, (4) Segala risiko yang ditemukan ditanggapi dan ditindak dengan cara diklasifikasi dengan dilaporkan secara benar.

Sama halnya dengan yang lain, disamping keunggulan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh suatu instansi disaat menggunakan *risk based internal auditing*, penerapan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Menurut Kurniawan (2015), kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan *risk based internal auditing* antara lain:

- A. Ancaman terhadap kebebasan yang dimiliki oleh auditor internal.
- B. Perlu usaha yang lebih keras, karena auditor intern harus bisa membuat manajemen membeberkan informasi tentang apa saja risiko sedang dihadapi oleh intansi.
- C. Harus diadakannya pelatihan ulang agar pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengerti, karena *risk based internal auditing* mempunyai pertidaksamaan yang cukup dasar bila dibandingkan dengan metode yang sebelumnya masif diterapkan selama ini.

Seperti yang diungkapkan oleh BPKP sebelumnya, bahwa penerapan *risk based internal auditing* ada hubungannya dengan perubahan paradigma yang berlangsung. Untuk itu apabila intansi melakukan perubahan dari metode konvensional ke *risk based internal auditing*, maka semua pihak yang terkait harus juga mempunyai perubahan paradigma secara total, karena perubahan pendekatan ini merupakan perubahan yang mendasar. Tunggal (2012) mengungkapkan secara umum perubahan yang terjadi yaitu:

1. Perencanaan *risk based internal auditing* difokuskan pada wilayah yang memiliki risiko tinggi, sehingga waktu audit yang digunakan juga akan lebih banyak pada wilayah tersebut,
2. *Risk based internal auditing* lebih fokus mengalokasikan waktu untuk melakukan evaluasi terkait dengan keefektifitasan dan kontrol internal intansi, tata kelola yang baik dan sistim informasi yang mencakup: operasi perusahaan yang efektif dan efisien, informasi keuangan dan operasinya memiliki integritas dan kehandalan, aset perusahaan terlindungi, dan juga ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Tabel 2.1 Perubahan Pendekatan Audit Internal Berbasis Risiko

No	Perubahan	Pendekatan Lama	Pendekatan Baru
1	<i>Audit Universe</i>	Lebih mengutamakan area finansial dan kepatuhan kepada kebijakan dan prosedur internal.	Semua aktivitas usaha, khususnya yang mengandung risiko usaha (<i>business risk</i>) perlu dipetakan.
2	Tujuan Audit	Lebih kepada memastikan bahwa pengendalian internal bekerja secara efektif dan perannya untuk meningkatkan efisiensi tanpa melihat keberadaannya untuk mengendalikan risiko.	Lebih kepada memberikan kepastian (<i>assurance</i>) bahwa risiko yang diidentifikasi telah dikurangi ke tingkat yang dapat diterima.
3	Rencana Audit Tahunan	Siklus audit ditetapkan secara berkala dan biasanya dilakukan secara mendadak (<i>surprise audit</i>) tanpa memperhatikan tingkat risiko.	Audit akan lebih diprioritaskan ke area yang berisiko tinggi.
4	Tugas Lapangan	Dilakukan berdasarkan pada seperangkat rencana kerja (<i>work plan</i>) yang mungkin tanpa tujuan spesifik.	Tugas lapangan lebih kepada memastikan bahwa perusahaan telah mengidentifikasi, mengendalikan dan memantau semua risiko yang ada.

No	Perubahan	Pendekatan Lama	Pendekatan Baru
5	Pengujian	Pengujian untuk mengkonfirmasi bekerjanya pengendalian tanpa mengurutkan menurut tingkat kepentingannya dan lebih mengarah kepada temuan kesalahan walaupun tidak material dengan akibat laporan yang tebal.	Masih tetap menggunakan teknik pengujian yang sama, tetapi lebih memastikan bahwa pengendalian utama (<i>important risk control</i>) berfungsi dengan baik untuk mengurangi risiko.
6	Pelaporan	Lebih mengutamakan penyimpangan yang signifikan dengan tetap merekam semua penyimpangan yang tidak material tetapi jumlahnya banyak.	Lebih kepada memberikan keyakinan bahwa semua risiko khususnya yang utama telah dikelola secara baik, dan melaporkan secara rinci risiko yang tidak dikurangi dengan baik.
7	Rekomendasi	Rekomendasi diberikan dalam kaitan dengan pengendalian agar diperkuat, memperhatikan <i>cost benefit</i> , efisiensi dan efektivitas.	Rekomendasi akan diberikan dalam kaitan dengan manajemen risiko agar risiko dihindari, diakhiri, ditransfer, didiversifikasi atau diterima dan dikelola.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai referensi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai acuan dasar, meskipun pada pelaksanaannya terdapat perbedaan objek yang digunakan. Berikut merupakan deskripsi singkat beserta tabel penelitian yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Choirul Anwar (2009) dengan judul *Risk Based Internal Auditing Dan Implementasinya Pada PT IBF*, memiliki tujuan memberikan gambaran tentang hubungan diantara *internal control* dan tujuan dari bagian audit internal PT IBF. Hasil penelitian ini menunjukkan jika PT IBF secara keseluruhan sudah dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam operasi pelaksanaannya secara keseluruhan. Tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan jika terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya, manajemen harus menganalisis dan menindaklanjutinya agar hal tersebut bisa diperbaiki.

Hasan dkk (2017) melakukan penelitian dengan judul Analisis Perencanaan Audit Berbasis Risiko di Inspektorat Kota Yogyakarta. Merupakan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan studi kasus dan wawancara. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melakukan identifikasi terkait dengan hal yang menyebabkan Inspektorat Kota Yogyakarta belum dapat melaksanakan perencanaan audit risiko secara keseluruhan, dan juga melakukan identifikasi terkait dengan usaha-usaha yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta dalam penerapan perencanaan *risk based internal auditing* secara keseluruhan. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan jika Inspektorat Kota Yogyakarta masih belum secara menyeluruh melaksanakan perencanaan *risk based internal auditing*, hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yakni faktor terkait dengan norma, kebudayaan dan juga faktor eksternal.

Mathew (2018) melakukan penelitian terkait *risk based internal auditing* dengan judul Implementasi Audit Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Mathew ini memiliki tujuan untuk mencari tahu seperti apa pengimplementasian *risk based internal auditing* yang dilakukan oleh OJK beserta cara pendekatannya, dan juga untuk mencari tahu seperti apa peranannya pada pengelolaan risiko di OJK. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan *risk based internal auditing* membuat risiko yang dimiliki oleh otoritas jasa keuangan dapat diprediksi dan ditekan sedemikian rupa sebelum risiko tersebut benar-benar terwujud. Dalam pelaksanaannya, departemen AIMPRK di OJK ini sudah memisahkan tugas-tugasnya menjadi tiga garis pertahanan, hal ini dilakukan agar masing-masing departemen yang ada bisa melaksanakan tupoksinya dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan auditnya, sudah mematuhi standar yang berlaku yakni ISO 9001:2015 dan juga model kapabilitas audit internal untuk sektor publik.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil
(Anwar, 2009)	<i>Risk Based Internal Auditing</i> Dan Implementasinya Pada PT IBF	Hasil penelitian ini menunjukkan jika PT IBF secara keseluruhan sudah dapat mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam operasi pelaksanaannya secara keseluruhan. Tetapi, hasil penelitian juga menunjukkan jika terdapat beberapa kekurangan

Peneliti	Judul	Hasil
		dalam pelaksanaannya, manajemen harus menganalisis dan menindaklanjutinya agar hal tersebut bisa diperbaiki.
Hasan dkk (2017)	Analisis Perencanaan Audit Berbasis Risiko di Inspektorat Kota Yogyakarta	Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan jika Inspektorat Kota Yogyakarta masih belum secara menyeluruh melaksanakan perencanaan <i>risk based internal auditing</i> , hal ini dikarekan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yakni faktor terkait dengan norma, kebudayaan dan juga faktor eksternal.
Mathew (2018)	Implementasi Audit Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan <i>risk based internal auditing</i> membuat risiko yang dimiliki oleh otoritas jasa keuangan dapat diprediksi dan ditekan sedemikian rupa sebelum risiko tersebut benar-benar terwujud.

Peneliti	Judul	Hasil
		<p>Dalam pelaksanaannya, departemen AIMPRK di OJK ini sudah memisahkan tugas-tugasnya menjadi tiga garis pertahanan, hal ini dilakukan agar masing-masing departemen yang ada bisa melaksanakan tupoksinya dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan auditnya, sudah mematuhi standar yang berlaku yakni ISO 9001:2015 dan juga model kapabilitas audit internal untuk sektor publik.</p>

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah strategi yang penekanannya terletak pada pengertian, karakteristik, gejala, konsep, pengertian, maupun pendeskripsian terkait sebuah fenomena, fokus dan beragam metode, yang memiliki karakteristik alami, mengedepankan kualitas, memakai banyak cara, dan juga menyajikannya secara narasi (Yusuf, 2014). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap fakta, kondisi, fenomena atau kejadian yang berlangsung pada saat dilakukan penelitian.

3.2. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Menurut Idriantoro dan Supomo (2011), data primer adalah sumber data penelitian yang secara langsung didapatkan asli dari sumbernya. Cara memperoleh data primer tersebut bisa dari wawancara, dokumentasi pribadi, foto, video, catatan lapangan, memo atau dokumen lainnya seperti pendapat narasumber, persepsi, pengalaman, karakteristik atau sikap dari orang atau satu kelompok orang yang berlaku sebagai subjek penelitian. Data primer penelitian kali ini didapatkan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber terkait di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

3.3. Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

A. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengambilan data utama dalam metodologi kualitatif. Moleong (2017) mengemukakan pendapatnya terkait

pengertian wawancara, yakni perbincangan antara dua orang atau pihak dimana salah satunya yang bertugas memberikan sejumlah pertanyaan disebut pewawancara dan pihak yang mengungkapkan jawaban atau pertanyaan tersebut disebut terwawancara, kedua pihak tersebut memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tujuan diadakannya wawancara menurut Moleong (2017) diantaranya adalah mengonstruksi motivasi, kejadian, orang, organisasi, perasaan, kepedulian, tuntutan dan lain-lainnya. Peneliti melakukan wawancara dalam penelitian ini dengan menyampaikan pertanyaan langsung kepada kepala irban dan staf auditor yang terlibat dengan aktivitas audit berbasis risiko di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

B. Dokumentasi

Bungin, 2001 mengungkapkan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang dipakai guna mencari dan mengusut data historis. Observasi dan wawancara penelitian akan menghasilkan hasil yang lebih dapat dipercaya atau kredibel apabila ada dokumentasi yang tepat mendukungnya (Sugiyono, 2010). Dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini yakni dokumen yang berkaitan dengan proses pengimplementasian *risk based internal auditing* di Inspektorat Kabupaten Banyuwangi.

3.4. Keabsahan Data

Kebenaran dan ketepatan hasil penelitian ditentukan oleh keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan serta dianalisis sejak penelitian. Pada penelitian ini pemeriksaan keabsahan data yang akan digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik triangulasi. Menurut Denzin (1970), triangulasi dapat menyelamatkan penelitian kualitatif dari berbagai bias dan kekurangan yang bersumber dari pengendalian sumber data, peneliti, teori, dan metode yang tunggal. Menurut *Institute of Global Tech* dalam penelitian Bachri triangulasi digunakan untuk menemukan dengan

cepat pengujian data yang sudah dilakukan untuk memeperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan dan juga program berbasis pada bukti yang telah ditemukan. Menurut Bachri, tujuan triangulasi bukan mencari kebenaran namun untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang dimiliki (Bachri, 2010).

Pada penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode, yaitu membandingkan informasi dengan cara yang berbeda. Menurut Norman Denkin, cara yang dapat ditempuh untuk membandingkan informasi dalam triangulasi metode ada 3 yaitu:

1. Menggunakan metode wawancara bebas dan teratur
2. Menggunakan wawancara dan observasi
3. Menggunakan informan yang berbeda

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi metode dengan cara menggunakan hasil wawancara bersama informan yang berbeda.

3.5. Metode Penganalisisan Data

Suatu proses penelusuran dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, dokumentasi, foto, catatan lapangan, dan materi lainnya yang sistematis guna menambah tingkat pemahaman peneliti terkait dengan data yang sudah didapatkan, hingga akhirnya peneliti dapat menyajikan temuannya dan menyebarkan informasi kepada orang lain di sekitarnya merupakan pengertian dari analisis data (Yusuf, 2017). Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian kali ini menggunakan antara lain:

1. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data yang didapatkan melalui kegiatan tanya-jawab atau wawancara dan observasi secara langsung, kemudian peneliti catat secara objektif dan peneliti akan

melengkapinya dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data sekunder yang dibutuhkan.

2. Reduksi Data

Rangkaian proses pembuatan pilihan, berpusat pada menyederhanakan dan perubahan data yang masih kasar berasal dari catatan lapangan yang tertulis disebut dengan reduksi data (Miles dan Huberman, 2009). Penelitian ini menggunakan reduksi data dengan cara menyeleksi dan tidak mengikutsertakan jawaban-jawaban yang melenceng dari konteks. Proses dilakukannya pereduksian data ini terkait dengan data yang dipilah-pilah berdasarkan relevansi pertanyaan yang diajukan.

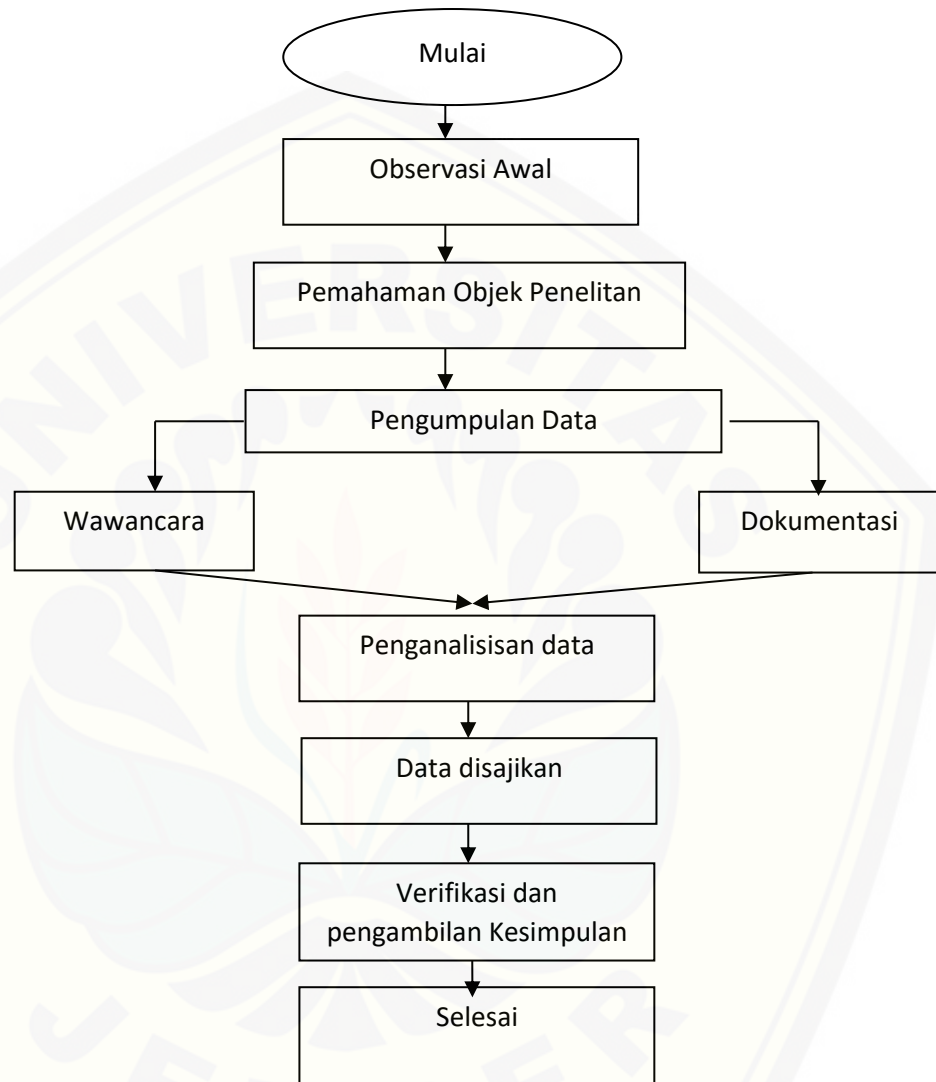
3. Penyajian Data

Ulber (2009) menyatakan bahwa beberapa informasi yang telah dihimpun dan telah disusun memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan disebut dengan penyajian data. Pengumpulan dan penyajian data dalam penelitian ini menggunakan bentuk analisis deskriptif. Peneliti akan menyajikan analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, lalu mengklarifikasikan dan menjelaskannya sejalan dengan adanya data tanpa melakukan penambahan atau pengurangan.

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti kumpulkan dan rangkum sebelumnya tersebut peneliti masih harus mencocokkannya pada reduksi dan penyajian data supaya kesimpulan yang diperoleh bisa mendapat kesepakatan dan dapat menyusunnya sebagai suatu laporan. Pelaksanaan pengumpulan data, reduksi dan juga proses penarikan kesimpulan adalah satu kesatuan dan dapat berlangsung secara bolak-balik, sampai didapat hasil penelitian akhir yang sifatnya holistik dan penuh dengan makna dalam pemberian jawaban terkait problematika masalah yang telah dikaji (Atmadja, 2006).

3.6. Tahapan Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka penelitian

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan peneelitan yang telah dilakukan dan mendapatkan hasil wawancara dengan kepala irban 2 dan pelaksana teknis Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi *risk based internal auditing* sejauh ini sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sesuai dengan pasal 13 ayat 1, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi telah melakukan penilaian risiko dalam pelaksanaan auditnya, yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko (ayat 2). Terkait dengan pelaksanaan *risk based internal auditing* ini, Inspektorat Kabupaten Banyuwangi masih tergolong baru dan menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya, sehingga masih harus terus dibenahi atau disempurnakan untuk kedepannya.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari adanya keterbatasan yang ada di dalam penelitian ini. Keterbatasan tersebut antara lain saat peniliti terjun melakukan penelitian, para auditor sedang bertugas di luar inspektorat dan tidak dapat ditemui selama satu bulan lebih. Setelah itu terjadi pandemi yang membuat peneliti tidak dapat mendatangi objek penelitian kembali, sehingga ada narasumber yang menjawab pertanyaan wawancara dalam bentuk tulisan.

5.3. Saran

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik penelitian serupa, sebaiknya memperhatikan waktu penelitian, lebih baik saat narasumber tidak sedang bertugas diluar objek penelitian agar proses wawancara berjalan lancar. Selain itu juga diupayakan agar wawancara dilakukan secara lisan, agar hasil wawancara bisa lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. (2009). Risk Based Internal Auditing dan Implementasinya pada PT IBF. *The Winners*, 10(2), 89. <https://doi.org/10.21512/tw.v10i2.703>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Situs Resmi. Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/spip/konten/400/sekilas-spip.bpkp>. Tanggal 5 Oktober 2019.
- Association of Certified Fraud Examiners. 2017. *Survei Fraud Indonesia 2016*. Agustus. Jakarta: ACFE Indonesia Chapter
- Black's Law Dictionary. 1891. The West Company
- B.N Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*
- Dewi Yuniarti Rozali, R., & Mohammad, J. (2015). Pengaruh Pelaksanaan Risk Based Internal Auditing Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(3), 831. <https://doi.org/10.17509/jrak.v3i3.6623>
- Dull, B. Richard dan Ulrich Gelinas. 2012. *Accounting System Information System*. South Western Cengage Learning.

- Dunil, Z. 2005. *Bank Auditing Risk Based Audit Dalam Pemeriksaan Perkreditan Bank Umum*. Jakarta: Indeks
- Hasan, Waode Adriani dan Slamet Sugiri. *Analisis Perencanaan Audit Berbasis Risiko Di Inspektorat Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- ICW. (2019). Kasus Korupsi Tahun 2019. *Indonesian Corruption Watch*.
https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2_pdf
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988
- Ketetapan MPR-RI Nomor XVMPR/1998. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*
- Kumat, Valery, G. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga
- Kurniawan, Ardeno. 2012. *Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi*. Yogyakarta: BPFE
- Laporan kinerja instansi pemerintah kabupaten banyuwangi. 2017
- Laporan kinerja instansi pemerintah kabupaten banyuwangi. 2019
- Matthew, Yovano. 2018. *Implementasi Audit Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan*. Malang: Universitas Brawijaya
- McNamee. 1997. *Planning for the IA activity (macro level)*.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis. Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988
- Ketetapan MPR-RI Nomor XVMPR/1998. *Penyelenggaraan Otonomi Daerah*
- Kumat, Valery, G. 2011. *Internal Audit*. Jakarta: Erlangga
- Kurniawan, Ardeno. 2012. *Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi*. Yogyakarta: BPFE
- Laporan kinerja instansi pemerintah kabupaten banyuwangi. 2017
- Laporan kinerja instansi pemerintah kabupaten banyuwangi. 2019
- Matthew, Yovano. 2018. *Implementasi Audit Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Kinerja Otoritas Jasa Keuangan*. Malang: Univeritas Brawijaya
- McNamee. 1997. *Planning for the IA activity (macro level)*.
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 2009. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murdock, D. H., & Murdock, D. H. (2018). Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). *Auditor Essentials*, 7–10.
<https://doi.org/10.1201/9781315178141-3>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011. *Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum*

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 60 Tahun 2010. *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan tugas melaksanakan pengawasan intern dan Keputusan Inspektur Jenderal*. No. SK.08/HK.206/ITJEN-2014

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001. *Penyelenggaraan Dekonsentrasi*

Restukumala, Faisal Yoga. 2017. *Risk Based Internal Auditing*. Diakses dari <https://jtanzilco.com/blog/detail/693/slug/risk-based-audit>. Tanggal 25 November 2019

Simanjuntak, K. (2015). Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 07(02), 111–130.
<https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>

Sofianti, Septarina Prita Dania. 2018. *Akuntansi Forensik*. Jember: UPT Percetakan dan Penerbitan UNEJ.

Sudrajat, Gina Rohmania. 2013. *Pengaruh Pengalaman Audit, Independensi, Obyektivitas, Lingkup Audit dan Risiko Audit terhadap Kualitas Audit Survey pada Auditor Pemerintahan di BPKP Provinsi Jawa Barat*. Bandung: Universitas Widyatama

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Tampubolon, Robert. 2015. *Risk And System Based Internal Auditing*. Jakarta: Gramedia Digital

The institut of internal auditor atau IIA. 2016

Tuanakotta, Theodorus M. 2010. Edisi 2. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*.
Jakarta: Salemba Empat.

Tunggal, Amin Widjaja. 2012. *Internal Auditing, Edisi Lima*. Yogyakarta: BPFE.

Ulber, Silalahi. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. *Pemerintahan Daerah*

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. *Peimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. *Pemerintahan Daerah*.

Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Penelitian
Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group

LAMPIRAN 1

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Tanggal wawancara : 21 Februari 2020

Tempat : Inspektorat Banyuwangi

Informan 1

1. Nama : Marwoto
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Jabatan : Kepala Irban 2

Informan 2

1. Nama : Slamet Sukirno
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Jabatan : Auditor madya / pengendali teknis

Wawancara:

1. Sejak kapan audit berbasis risiko diterapkan di Inspektorat Banyuwangi?

Bapak Marwoto: Perencanaan audit berbasis risiko di inspektorat kabupaten banyuwangi ini sudah dimulai tahun 2017. Dalam menyusun Perencanaan tahunan (Program Kerja Pengawasan Tahunan/PKPT) dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan risiko untuk tiap OPD.

Bapak Slamet sukirno: Sejak tahun 2017.

2. Sebelumnya menggunakan apa? Apa yang membedakan audit berbasis risiko dengan yang sebelumnya?

Bapak Marwoto: Sebelumnya dalam menyusun PKPT tidak memperhatikan faktor risiko. Seluruh OPD dilakukan pemeriksaan, tidak memperhatikan skala prioritas OPD mana yang akan dijadikan Obyek pemeriksaan.

Bapak Slamet sukirno: Sebelumnya menggunakan audit konvensional. Perbedaannya audit konvensional dengan audit berbasis risiko:

Audit sebelumnya		<i>Risk based internal auditing</i>
1.	Menitik-beratkan terhadap resiko manajemen, berkaitan dengan terapainya audit <i>goals</i> .	Menitik-beratkan terhadap penilaian resiko. Tidak hanya untuk audit, tetapi penilaian resiko yang dilakukan oleh auditor fokus pada resiko pengembangan dan keberlangsungan kegiatan untuk tercapainya manajemen <i>goals</i> .
2.	Memfokuskan pada kejadian waktu dulu	Auditor merancang scenario resiko untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, yang mungkin saja memiliki dampak terhadap tercapainya manajemen <i>goals</i> .
3.	Pelaporan sesuai dengan ketentuan audit <i>goal</i> , yang paling utama terkait dengan pengendalian apakah berfungsi atau tidak	Dibandingkan dengan mengungkap apakah pengendalian berfungsi atau tidak, pelaporan audit lebih menitikberatkan terhadap pengungkapan proses yang beresiko
4.	<i>System based audit approach</i>	<i>Risk based internal auditing approach</i>

Inspektorat Kabupaten Banyuwangi masih menggunakan 2 (dua) pendekatan audit tersebut, karena berdasarkan pedoman konsepsi

Pendekatan audit berbasis risiko bukan berarti menggantikan pendekatan audit konvensional.

3. Se-Karesidenan Besuki hanya Banyuwangi yang telah menerapkan audit berbasis risiko. Apa yang mendasari pelaksanaan audit berbasis risiko di sini?

Bapak Marwoto: Yang mendasari adalah jumlah tenaga/auditor yang terbatas. Sementara tugas-tugas mandatory semakin banyak. Sehingga tidak seluruh OPD dan jenis kegiatan bisa diperiksa seluruhnya. Tanpa melakukan perencanaan yang matang, hasilnya tidak akan maksimal.

Bapak Slamet sukirno: Dasar pelaksanaan audit berbasis risiko yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bagian ketiga Penilaian Risiko pasal 13 sampai dengan pasal 17 dan implementasinya mengacu pada 2 (dua) pedoman sebagai berikut :

- a. Pedoman konsepsi perencanaan pengawasan intern berbasis risiko bagi APIP Daerah yang diterbitkan BPKP,
- b. Pedoman perencanaan audit berbasis risiko Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh AAIFI

4. Apa tujuan pelaksanaan audit berbasis risiko?

Bapak Marwoto: Tujuannya agar pelaksanaan audit lebih efektif. Yang dilakukan audit adalah OPD/kegiatan yang benar-benar perlu diaudit. Sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga.

Bapak Slamet sukirno: Tujuan pelaksanaan audit berbasis risiko yaitu memberikan keyakinan atau penjaminan kepada manajemen bahwa: institusi yang di audit memiliki proses identifikasi dan analisis risiko dan

prosesnya sudah dirancang dengan baik, proses manajemen risiko diintegrasikan oleh manajemen ke dalam semua tingkatan organisasi mulai tingkat tertinggi hingga terendah telah berfungsi dengan baik, kerangka kerja internal dan tata kelola yang baik sudah tersedia secara cukup dan berfungsi dengan baik guna mengendalikan risiko.

5. Bagaimana proses pelaksanaannya?

Bapak Marwoto:

Proses perencanaan audit berbasis risiko dilakukan dengan urutan sebagai berikut :

1. Menetapkan kriteria faktor risiko yang akan dijadikan tolok ukur menilai risiko
2. Menetapkan sub kriteria penilaian untuk setiap faktor risiko
3. Menetapkan bobot nilai untuk setiap kriteria
4. Melakukan penilaian setiap OPD berdasar kriteria
5. Membuat ranking OPD yang nilai risikonya tinggi
6. Menetapkan OPD yang akan dijadikan obyek pemeriksaan berdasarkan ranking risiko

Bapak Slamet sukirno: Proses pelaksanaannya:

- a. Penyusunan peta auditan
- b. Penilaian tingkat kematangan manajemen risiko
- c. Penentuan risiko utama
- d. Penyusunan perencanaan PKPT
- e. Penyampaian laporan

6. Bagaimana cara mengidentifikasi risiko? Bagaimana menentukan identifikasi tersebut?

Bapak Marwoto: Sama dengan nomor pertanyaan sebelumnya. Urutannya:

1. Menetapkan kriteria faktor risiko yang akan dijadikan tolok ukur menilai risiko
2. Menetapkan sub kriteria penilaian untuk setiap faktor risiko
3. Menetapkan bobot nilai untuk setiap kriteria
4. Melakukan penilaian setiap OPD berdasar kriteria
5. Membuat ranking OPD yang nilai risikonya tinggi
6. Menetapkan OPD yang akan dijadikan obyek pemeriksaan berdasarkan ranking risiko

Bapak Slamet sukirno: Cara mengidentifikasi risiko yaitu menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Identifikasi risiko dimaksudkan untuk mengenali setiap ketidakpastian yang berdampak buruk bagi pencapaian tujuan organisasi atau program/kegiatan. Risiko diukur dalam dua dimensi ukuran yaitu: kemungkinan keterjadian (*likelihood*), dampak pengaruh (*Impact*). Proses manajemen risiko dimulai dengan mengidentifikasi peristiwa yang mungkin timbul dan dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Risiko yang melekat di suatu organisasi sebelum manajemen mengambil tindakan untuk mempengaruhi tingkat keterjadian maupun dampak risiko tersebut dikenal dengan istilah risiko inheren (*inherent risk*). Sedangkan, risiko yang masih ada setelah manajemen menetapkan dan menerapkan respon atas suatu risiko, disebut sebagai risiko residual (*residual risk*). Tingkat risiko residual harus berada pada level yang dapat diterima oleh manajemen (*risk appetite*).

7. Bagaimana cara membuat peta risiko?

Bapak Marwoto: Sama juga dengan dua pertanyaan sebelumnya.

1. Menetapkan kriteria faktor risiko yang akan dijadikan tolok ukur menilai risiko
2. Menetapkan sub kriteria penilaian untuk setiap faktor risiko
3. Menetapkan bobot nilai untuk setiap kriteria
4. Melakukan penilaian setiap OPD berdasar kriteria
5. Membuat ranking OPD yang nilai risikonya tinggi
6. Menetapkan OPD yang akan dijadikan obyek pemeriksaan berdasarkan ranking risiko

Bapak Slamet sukirno: Awalnya mulai dari memahami proses bisnisnya pemerintahan daerah, proses itu dibutuhkan agar APIP daerah lebih mudah melakukan pengkategorian, dalam rangka penyusunan peta audit dan juga objek audit yang masuk dalam peta audit harus dipastikan masih relevan. Selain itu, ada beberapa info yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh APIP antara lain:

- a. Tujuan strategis organisasi
- b. Proses bisnis organisasi dan struktur organisasi
- c. Kegiatan utama dari organisasi
- d. Lokasi dari unit-unit kerja organisasi
- e. Profil risiko organisasi dan selera
- f. Hasil revidu atas pengendalian internal dan manajemen risiko organisasi
- g. Sumber daya dan kemampuan tim audit intern
- h. Regulasi terkait
- i. Jasa penjaminan dari pihak eksternal

8. Program kerja berbasis risiko di inspektorat seperti apa? Bagaimana cara merumuskannya?

Bapak Marwoto: Tidak ada program kerja berbasis risiko. Yang ada perencanaan penugasan/audit berbasis risiko.

Bapak Slamet sukirno: Program kerja berbasis risiko di kantor kami masih sangat sederhana sesuai batas kemampuan kami dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, cara merumuskannya mengacu pada pedoman yang telah ada dan sesuai dengan batas pengetahuan dan kemampuan kami.

9. Apakah pelaksanaannya selama ini sudah berjalan dengan baik?

Bapak Marwoto: Pelaksanaan sudah berjalan, dan dilakukan setiap awal tahun

Bapak Slamet sukirno: Pelaksanaannya belum berjalan dengan baik atau belum sesuai target yang ditetapkan karena masih terdapat hambatan/kendala, faktor internal dan eksternal dan hingga saat ini masih terus dibenahi atau disempurnakan.

10. Apakah ada kendala yang dialami?

Bapak Marwoto: Kendala yang dihadapi dalam penyusunan perencanaan audit berbasis risiko adalah risiko yang dipetakan belum tentu tepat. Dalam pelaksanaan audit tahun berjalan, terkadang timbul kegiatan/OPD lain yang berisiko tinggi namun tidak terpetakan.

Bapak Slamet sukirno: Masih rendahnya pemahaman terhadap Identifikasi dan analisis risiko di masing- masing SKPD, SDM atau aparatur di masing- masing SKPD belum secara serius ingin memahami terhadap Identifikasi dan analisis risiko, sosialisasi terhadap pentingnya Identifikasi dan analisis risiko dimasing-masing SKPD belum dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

11. Apa manfaat yang diperoleh setelah pelaksanaan audit berbasis risiko?

Bapak Marwoto: Manfaat yang diperoleh adalah pelaksanaan audit lebih efektif. Tidak seluruh OPD diperiksa. Tidak seluruh kegiatan diperiksa. Dan juga proses audit lebih terarah.

Bapak Slamet sukirno: Manfaat yang diperoleh setelah pelaksanaan yaitu membantu auditan agar fokus pada hal-hal yang signifikan dan berdampak luas yakni identifikasi risiko utama yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan, Membantu pimpinan atau auditan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan manajemen risiko yang efektif, Mengidentifikasi risiko-risiko utama yang menjadi skala prioritas sesuai proses bisnisnya.

12. Apakah ada pelatihan khusus atau sosialisasi mengenai audit berbasis risiko ini di dinas-dinas terkait?

Bapak Marwoto: Pelatihan khusus tidak ada. Karena yang terkait adalah auditor/Irban/Subag Sungram/Sekretaris yang melakukan perencanaan tahunan

Setiap tahun dilakukan rapat/pembahasan perencanaan tahunan (PKPT) yang merupakan hasil kerja Tim Penyusun PKPT.

Bapak Slamet sukirno: Pelatihan secara khusus belum ada namun Bimtek mengenai audit berbasis risiko ini di dinas-dinas terkait telah dilakukan.

13. Apakah ada bedanya terkait banyak temuan sebelum dan sesudah menggunakan audit berbasis risiko?

Bapak Marwoto: Perencanaan audit berbasis risiko tidak terkait dengan temuan, tapi terkait dengan efektifitas pelaksanaan audit.

Bapak Slamet sukirno: Secara teori terdapat korelasi antara pengendalian intern, identifikasi risiko dan Analisa risiko yang dibangun oleh manajemen

secara baik atau buruk dengan banyak atau sedikit jumlah temuan audit. Dalam prakteknya terkait banyak dan sedikit temuan selain tergantung dari kemampuan deteksi dari SDM APIP juga lebih dipengaruhi oleh SPIP atau delapan unsur pengendalian yang dibangun, serta faktor risiko yang tidak teridentifikasi dan tidak dianalisa secara memadai oleh manajemen atau entitas, adapun faktor risiko yang mempengaruhi antara lain Pengelolaan Jumlah Anggaran, Efektivitas Pengendalian Intern, Potensi terjadinya kecurangan, Pemangku kepentingan, Sebaran Kegiatan. Apabila 5 lima faktor risiko tersebut telah dibangun mitigasi risiko secara memadai memberikan keyakinan atau menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dapat dicapai serta dapat mencegah terjadinya penyimpangan secara preventif. Audit berbais risiko titik beratnya pada penilaian atas risiko. Auditor melakukan penilaian risiko bukan hanya untuk audit, namun lebih difokuskan pada risiko atas kelangsungan dan perkembangan aktivitas dalam rangka pencapaian tujuan manajemen, Jenis temuan lebih bersifat pada risiko yang bersifat stratejik, bisnis proses dan risiko operasional. Pelaksanaan Audit berbasis risiko akan meningkatkan peran APIP sesuai paradigma pengawasan yaitu fungsi : *Consulting service, Early warning system dan Quality assurance*.

Audit berbasis risiko perlu direncanakan secara baik dan perencanaan audit berbais risiko dapat dinilai efektif apabila memenuhi tiga hal:

1. Audit yang dilaksanakan sangat dibutuhkan unsur ketelitian, namun apabila PABR telah baik tingkat ketelitian yang sudah tinggi tidak perlu ditingkatkan lebih tinggi lagi
2. Audit yang dilakukan tidak perlu lagi menambah prosedur audit
3. Analisa yang dilakukan tidak perlu lagi menambah hari kerja pengawasan.

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI

Visi Dan Misi

Visi
Terwujudnya pengawasan yang profesional guna tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel di Kabupaten Banyuwangi

Misi
Disamping menetapkan visi, Inspektorat juga menetapkan misi dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian internal dan kepatuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengawasan

Visi dan misi Inspektorat Kabupaten Banyuwangi

Lampiran 1 Surat Keputusan Inspektorat Kab. Banyuwangi
Nomor : 188 / 429.060/2019
Tanggal 31 Desember 2019

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI

NO	TEMA	JENIS	TUJUAN	SASARAN	DIRAIK	URAIAN	BM	HP	BMP	BSP	RPL	ANGGARAN	REKOD	ESTERANGAN
XI20001	Consulting	Pendampingan	Mendampingi OPD melakukan Identifikasi Risiko	Register Risiko	OPD	Pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada 2 OPD	1	6	0101	0102	0104	10.544.766	SEDANG	NA
XI20002	Consulting	Pendampingan	Mendampingi OPD melakukan Identifikasi Risiko	Register Risiko	OPD	Pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada 2 OPD	2	6	0101	0102	0104	10.544.766	SEDANG	NA
XI20003	Consulting	Pendampingan	Mendampingi OPD melakukan Identifikasi Risiko	Register Risiko	OPD	Pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada 2 OPD	3	6	0101	0102	0104	10.544.766	SEDANG	NA
XI20004	Consulting	Pendampingan	Mendampingi OPD melakukan Identifikasi Risiko	Register Risiko	OPD	Pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada 2 OPD	4	6	0101	0102	0104	10.544.766	SEDANG	NA
XI20005	Consulting	Pendampingan	Mendampingi OPD melakukan Identifikasi Risiko	Register Risiko	OPD	Pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada 2 OPD	5	6	0101	0102	0104	10.544.766	SEDANG	NA
XI20006	Consulting	Pendampingan	Mendampingi OPD melakukan Identifikasi Risiko	Register Risiko	OPD	Pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada 2 OPD	6	6	0101	0102	0104	10.544.766	SEDANG	NA
XI20007	Consulting	Pendampingan	Mendampingi OPD melakukan Identifikasi Risiko	Register Risiko	OPD	Pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada 2 OPD	7	6	0101	0102	0104	10.544.766	SEDANG	NA
XI20008	Consulting	Pendampingan	Mendampingi OPD melakukan Identifikasi Risiko	Register Risiko	OPD	Pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada 2 OPD	8	6	0101	0102	0104	10.544.766	SEDANG	NA
XI20009	Consulting	Pendampingan	Mendampingi OPD melakukan Identifikasi Risiko	Register Risiko	OPD	Pendampingan penerapan Manajemen Risiko pada 2 OPD	9	6	0101	0102	0104	10.544.766	SEDANG	NA
XI20010	Assurance	Evaluasi	Terbisa administrasi, liveness Risk, ketepatan pelaporan	DD/ADD	Desa	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan dan Pelaporan Regulasi di Desa Tahun 2019	9	12	0102	0104	0201	20.517.300	TINGGI	NA
XI20011	Assurance	Evaluasi	Terbisa administrasi, liveness Risk, ketepatan pelaporan	DD/ADD	Desa	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan dan Pelaporan Regulasi di Desa Tahun 2019	2	12	0102	0104	0201	20.517.300	TINGGI	NA

202012	Assurance	Evaluasi	Terbit administratif, sesuai full, ketepatan pelaporan	00/ADD	Desa	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan dan Pelaporan kegiatan di Desa Tahun 2019	3	12	0202	0204	0201	20.537.700	Tinggi	NA
202013	Assurance	Evaluasi	Terbit administratif, sesuai full, ketepatan pelaporan	00/ADD	Desa	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan dan Pelaporan kegiatan di Desa Tahun 2019	4	12	0202	0204	0201	20.537.700	Tinggi	NA
202014	Assurance	Evaluasi	Terbit administratif, sesuai full, ketepatan pelaporan	00/ADD	Desa	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan dan Pelaporan kegiatan di Desa Tahun 2019	5	12	0202	0204	0201	20.537.700	Tinggi	NA
202015	Assurance	Evaluasi	Terbit administratif, sesuai full, ketepatan pelaporan	00/ADD	Desa	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan dan Pelaporan kegiatan di Desa Tahun 2019	6	12	0202	0204	0201	20.537.700	Tinggi	NA
202016	Assurance	Evaluasi	Terbit administratif, sesuai full, ketepatan pelaporan	00/ADD	Desa	Melakukan Evaluasi atas Pelaksanaan dan Pelaporan kegiatan di Desa Tahun 2019	7	12	0202	0204	0201	20.537.700	Tinggi	NA
202017	Assurance	Revisi	Pengembangan, pengukuran, kesesuaian SAP	Penelitian, Hutang, Piutang, Kas/Bank	Isipendit, Diklat, RSUD, Puskesmas, Bapenda, Dinas P2-tekhnika, Diklub	Revisi Saldo Perencanaan, Hutang, Piutang, Kas dan bank per 31 Desember 2019	8	12	0202	0204	0201	20.537.700	Tinggi	NA
202018	Assurance	Revisi	Pengembangan, pengukuran, kesesuaian SAP	Penelitian, Hutang, Piutang, Kas/Bank	Isipendit, Diklat, RSUD, Puskesmas, Bapenda, Dinas P2-tekhnika, Diklub	Revisi Saldo Perencanaan, Hutang, Piutang, Kas dan bank per 31 Desember 2019	1	12	0202	0204	0201	20.537.700	Tinggi	NA
202019	Assurance	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Agiatan	Program Pemda	OPD	Evaluasi Kinerja OPD 2019	9	12	0202	0204	0301	20.537.700	Tinggi	NA
202020	Assurance	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Agiatan	Program Pemda	OPD	Evaluasi Kinerja OPD 2019	2	12	0202	0204	0301	20.537.700	Tinggi	NA
202021	Assurance	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Agiatan	Program Pemda	OPD	Evaluasi Kinerja OPD 2019	3	12	0202	0204	0301	20.537.700	Tinggi	NA
202022	Assurance	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Agiatan	Program Pemda	OPD	Evaluasi Kinerja OPD 2019	4	12	0202	0204	0301	20.537.700	Tinggi	NA
202023	Assurance	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Agiatan	Program Pemda	OPD	Evaluasi Kinerja OPD 2019	5	12	0202	0204	0301	20.537.700	Tinggi	NA
202024	Assurance	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Agiatan	Program Pemda	OPD	Evaluasi Kinerja OPD 2019	6	12	0202	0204	0301	20.537.700	Tinggi	NA
202025	Assurance	Evaluasi Kinerja	Evaluasi Capaian Kinerja Program/Agiatan	Program Pemda	OPD	Evaluasi Kinerja OPD 2019	7	12	0202	0204	0301	20.537.700	Tinggi	NA

2

202006	Assurance	Revisi	Pengembangan, pengukuran, kesesuaian SAP	LEPD	BPKAD	Revisi LEPD	8	12	0202	0204	0301	20.537.700	Tinggi	NA
202007	Assurance	Revisi	Pengembangan, pengukuran, kesesuaian SAP	LEPD	BPKAD	Revisi LEPD	1	12	0202	0204	0301	20.537.700	Tinggi	NA
202008	Consulting	Pendampingan	Mendampingi desa menyusun perencanaan	00/ADD	Desa	Rendamping Perencanaan dan pengelanaan 00/ADD	9	6	0201	0202	0203	20.564.766	SEDANG	NA
202009	Consulting	Pendampingan	Mendampingi desa menyusun perencanaan	00/ADD	Desa	Rendamping Perencanaan dan pengelanaan 00/ADD	2	6	0201	0202	0203	20.564.766	SEDANG	NA
202010	Consulting	Pendampingan	Mendampingi desa menyusun perencanaan	00/ADD	Desa	Rendamping Perencanaan dan pengelanaan 00/ADD	3	6	0201	0202	0203	20.564.766	SEDANG	NA
202011	Consulting	Pendampingan	Mendampingi desa menyusun perencanaan	00/ADD	Desa	Rendamping Perencanaan dan pengelanaan 00/ADD	4	6	0201	0202	0203	20.564.766	SEDANG	NA
202012	Consulting	Pendampingan	Mendampingi desa menyusun perencanaan	00/ADD	Desa	Rendamping Perencanaan dan pengelanaan 00/ADD	5	6	0201	0202	0203	20.564.766	SEDANG	NA
202013	Consulting	Pendampingan	Mendampingi desa menyusun perencanaan	00/ADD	Desa	Rendamping Perencanaan dan pengelanaan 00/ADD	6	6	0201	0202	0203	20.564.766	SEDANG	NA
202014	Consulting	Pendampingan	Mendampingi desa menyusun perencanaan	00/ADD	Desa	Rendamping Perencanaan dan pengelanaan 00/ADD	7	6	0201	0202	0203	20.564.766	SEDANG	NA
202015	Assurance	Revisi	Pengembangan, pengukuran, kesesuaian SAP	LEPD	BPKAD	Revisi Laporan Keuangan BLUD	8	6	0201	0202	0203	20.564.766	Tinggi	NA
202016	Assurance	Revisi	Pengembangan, pengukuran, kesesuaian SAP	LEPD	BPKAD	Revisi Laporan Keuangan BLUD	1	6	0201	0202	0203	20.564.766	Tinggi	NA
202017	Assurance	Probyly audit	Mengikuti kesesuaian dengan aturan	PSI	ULP	Probyly Audit Tahap I	9	6	0301	0302	0303	20.564.766	Tinggi	NA
202018	Assurance	Probyly audit	Mengikuti kesesuaian dengan aturan	PSI	ULP	Probyly Audit Tahap I	2	6	0301	0302	0303	20.564.766	Tinggi	NA
202019	Assurance	Revisi	Kesesuaian dengan pedoman	RKPD	BAPELDA	Revisi RKPD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021	4	6	0301	0302	0303	20.564.766	Tinggi	NA
202020	Assurance	Revisi	Kesesuaian dengan pedoman	RKPD Perubahan	BAPELDA	Revisi RKPD Perubahan Kabupaten Banyuwangi tahun 2020	5	6	0301	0302	0303	20.564.766	Tinggi	NA
202041	Assurance	Revisi	Kelengkapan persyaratan pendana hibah Bansos	Hibah Bansos	Setida	Revisi kelengkapan persyaratan pendana hibah Bansos	1	6	0301	0302	0303	20.564.766	Tinggi	NA
202042	Assurance	Money	Monitoring, Evaluasi	Dana BOS	Sekolah	Monitoring dan Evaluasi penggunaan dana BOS di SD/SMP III	3	6	0301	0302	0303	20.564.766	Tinggi	NA
202043	Assurance	Money	Monitoring, Evaluasi	Dana BOS	Sekolah	Monitoring dan Evaluasi penggunaan dana BOS di SD/SMP III	7	6	0301	0302	0303	20.564.766	Tinggi	NA

3

Program kerja pengawasan tahunan



Inspektorat Kabupaten Banyuwangi (Tampak Dalam)



Wawancara dengan ketua irban 2